



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden



Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 439 Tahun 2013) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 646).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342).



Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama dan Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Catatan Pada Buku Tanah Elektronik yang Tervalidasi dan Penandatanganan Sertifikat Hak Atas Tanah dalam rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1042).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1275).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 612).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 401).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12).

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 77/KEP-7.1/III/2012 tentang Praksis Reforma Agraria.

Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE-100/I/2015 tentang Penggunaan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 451/KEP-100.8.2/VII/2018 tentang Tim Implementasi Layanan Pertanahan Secara Elektronik Kementerian ATR/BPN.



Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dan A. Z., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- GIS Consortium Aceh Nias, 2007, *Modul Pelatihan ArcGIS Tingkat Dasar*, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias, Banda Aceh.
- Guntur, I G. N., 2014, *Modul Pendaftaran Tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, A. S., *et.al.*, 2012, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Edisi 1, Cetakan Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Jatnika, H., 2013, *Pengantar Sistem Basis Data Memahami Konsep Dasar & Tuntutan Praktis Perancangan Database*, Andi, Yogyakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2016, *Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2007, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta.
- Parlindungan, A. P., 1989, *Berakhirnya Hak-Hak atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- Parlindungan, A. P., 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiawan, I K. O., 2019. *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, S., 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerodjo, I., 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Sumarja, FX., 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Waskito & Arnowo, H., 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah

Amri, “Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang Terwujudnya Makassar sebagai ‘Smart City’”, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 5, No. 2., Juli – Desember 2016.

Arifanty, A. 2019, *Perlindungan Arsip Vital Buku Tanah dan Warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo*, Tugas Akhir, Program Studi Diploma Kearsipan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Idrus, W. R., “Sistem SIP dan SIG dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan”, *Bulletin Land*, Vol. 12, Agustus – Oktober 2009.

Mustofa, F. C., “Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6, No. 2, November, 2020.

Mustofa, F. C., *et. al.*, “Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk Pemetaan Bidang Tanah Sebuah Tinjauan Pustaka Komprehensif”, *Majalah Ilmiah Globe*, Vol. 20, No. 1, April, 2018.

Noor, M. R., “Aspek Hukum Teknologi Digital dan Dokumentasi Pertanahan”, *Makalah*, Seminar I Institutional Partnership for Strengthening Land Administration (IPSLA) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, tanggal 8 – 9 Mei 2008.

Noor, M. R., “Membangun Sistem Informasi Pertanahan melalui Komputerisasi Kantor Pertanahan”, *Bulletin Land*, Vol. 12, Agustus – Oktober 2009.

Pinuji, S., “Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial dalam rangka Perwujudan *One Map Policy*”, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2016.

Santoso, U., “Penyimpangan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah”, *Perspektif*, Vol. XVIII, No. 2, Mei, 2013.

Saraswati, A. F., Silviana, A., Sukirno., “Implementasi Program Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Sitem Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, ____, 2016.

Satria, R. J., Arianto, T., Nugroho, A., “Pemanfaatan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) untuk Sistem Pengarsipan Warkah (Studi di Kantor Pertanahan

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 2, No. 1, Januari 2019.

Satriya, P. G., 2014, *Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem GeoKKP untuk Penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah*, Tugas Akhir, Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Wicaksono, D., 2016, *Evaluasi Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan: Studi Kasus Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia*, Karya Akhir, Program Studi Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

Internet

Kementerian ATR/BPN, “Aplikasi Sentuh Tanahku”, <https://www.atrbpn.go.id/Layanan-Publik/APLIKASI-SENTUH-TANAHKU>, diakses 12 April 2020.

Kementerian ATR/BPN, “Digitalisasi Dokumen Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Lakukan Kajian Teknis”, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/digitalisasi-dokumen-pertanahan-kementerian-atrbpn-lakukan-kajian-teknis-99676>, diakses 1 April 2020.

Kementerian ATR/BPN, “Komputerisasi Layanan Pertanahan”, <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan>, diakses pada 02 April 2020.

Kementerian ATR/BPN, “Penuhi Tuntutan Perubahan Zaman, Kementerian ATR/BPN Digitalisasi Arsip Pertanahan”, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/penuhi-tuntutan-perubahan-zaman-kementerian-atrbpn-digitalisasi-arsip-pertanahan-77334>, diakses 1 April 2020.

Ombudsman Republik Indonesia, “BPN Karimun Akui Kehilangan Warkah Terkait Sengketa Lahan Telunas”, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-bpn-karimun-akui-kehilangan-warkah-terkait-sengketa-lahan-telunas>, diakses 2 April 2020.